

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan Karya

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk dipenuhi dan dijamin tanpa terkecuali, yang dikelompokkan ke dalam lima klaster sesuai Konvensi Hak Anak PBB dalam (Isharyanto, 2020). Klaster 1 mencakup hak sipil dan kebebasan, seperti identitas, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi. Klaster 2 meliputi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman jika keluarga biologis tidak mampu. Klaster 3 menjamin hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan gizi yang cukup. Klaster 4 memastikan hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya untuk mendukung perkembangan anak. Sementara itu, klaster 5 menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan situasi darurat. Melalui kelima klaster ini, hak-hak anak diharapkan dapat terpenuhi secara menyeluruh demi mendukung tumbuh kembang mereka dengan optimal.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Perlindungan Anak dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin perlindungan anak, termasuk anak terlantar. Kewajiban ini menuntut pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial bagi anak-anak yang berisiko kehilangan dan kehilangan pengasuhan dari orang tuanya.

Yogyakarta menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak dengan berbagai masalah yang perlu diatasi agar hak dan kebutuhan mereka terpenuhi. Menurut pemutakhiran data PPKS dan PSKS (DIY, 2023), anak terlantar adalah anak berusia 6 hingga 18 tahun yang mengalami perlakuan buruk atau ditinggalkan oleh orang tua atau keluarganya. Kriteria anak terlantar mencakup mereka yang berasal dari keluarga miskin, anak yang diabaikan, dan anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar. Data terbaru tahun

2023 menunjukkan jumlah anak terlantar mencapai 5.128 jiwa, menyoroti perlunya perhatian serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di masyarakat.

Gambar 1. 1 Data Anak Terlantar



Sumber: Laporan Hasil Pemutakhiran Data PPKS PSKS 2023
Dinas Sosial Yogyakarta (2023)

Laporan tersebut dipertegas berdasarkan data dimana Gunungkidul menjadi wilayah dengan jumlah anak terlantar tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 1.168 anak laki-laki dan 994 anak perempuan. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam memastikan hak anak-anak terpenuhi.

NO	WILAYAH	AT	
		L	P
1	BANTUL	282	264
2	GUNUNGKIDUL	1.168	994
3	KOTA YOGYAKARTA	74	42
4	KULON PROGO	326	310
5	SLEMAN	850	798
JUMLAH		2.700	2.428

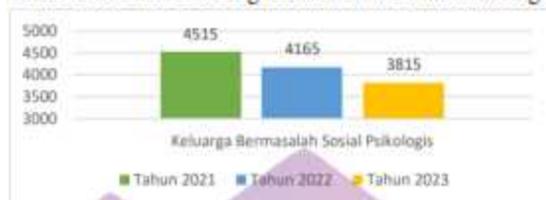
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama anak terlantar atau kehilangan pengasuhan, karena kondisi keuangan yang sulit membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perhatian yang memadai. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Adhania (2019) yang menekankan bahwa salah satu penyebab anak terlantar berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Anak terlantar diartikan sebagai situasi di mana hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memperoleh pendidikan

yang layak, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi, baik akibat kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan, maupun kesengajaan (Suyanto, 2010).

Pengasuhan orang tua juga merupakan aspek kunci dalam perkembangan anak, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Reaksi pertama yang sering dialami orang tua ketika mengetahui bahwa anak mereka berkebutuhan khusus adalah rasa terkejut (Safitri, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa ibu dari anak berkebutuhan khusus sering menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik yang lebih rendah, serta kualitas hidup yang tidak optimal. Stres dan tantangan yang dihadapi orang tua dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak anak. Ketidaktahuan terhadap kebutuhan khusus serta stigma sosial dapat membatasi akses anak-anak ini terhadap layanan dan dukungan yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko kehilangan hak-hak mereka. Menurut Sukmadi dkk. (2020) kualitas hidup berpengaruh langsung pada kesejahteraan psikologis orang tua, di mana pemikiran tentang masa depan anak sering menjadi sumber kecemasan yang signifikan.

Data terbaru dari pemutakhiran Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) tahun 2023 di Yogyakarta mencatat 3.815 jiwa yang terdaftar dalam kategori ini, menunjukkan adanya tantangan besar dalam kesejahteraan dan stabilitas keluarga di masyarakat. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis umumnya ditandai oleh hubungan yang kurang harmonis antar anggota, terutama antara suami-istri dan orang tua dengan anak. Ketidakteraturan ini dapat mengakibatkan fungsi dan tugas keluarga tidak berjalan dengan baik, yang pada gilirannya memperburuk situasi bagi anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini semakin meningkatkan risiko kehilangan hak-hak mereka, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih serius dari berbagai pihak. Gunungkidul merupakan wilayah dengan data KBSP tertinggi di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan tantangan yang serius bagi wilayah Gunungkidul terhadap kesejahteraan keluarga, terutama pada anak.

Gambar 1. 2 Data Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis



Sumber: Laporan Hasil Pemutakhiran Data PPKS PSKS 2023 Dinas Sosial Yogyakarta

NO	WILAYAH	KBSP	
		L	P
1	BANTUL	483	278
2	GUNUNGKIDUL	781	648
3	KOTA YOGYAKARTA	146	67
4	KULON PROGO	314	105
5	SLEMAN	661	335
JUMLAH		2.384	1.431

SOS Children's Villages muncul sebagai model alternatif yang memberikan dampak signifikan. Sebagai organisasi sosial nirlaba nonpemerintah yang aktif mendukung hak-hak anak, *SOS Children's Villages* berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan utama anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua, yaitu lingkungan keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang (Anggreni, 2023). Didirikan oleh Hermann Gmeiner, lembaga ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap banyaknya anak terlantar yang kehilangan hak pengasuhan akibat Perang Dunia II (Fahreza, 2020).

Gambar 1.3 Profil *SOS Children's Village* Yogyakarta



Sumber: Arsip Profil SOS Desa Taruna Indonesia Di Yogyakarta

Dengan pendekatan berbasis keluarga, *SOS Children's Villages* berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Keterlibatan aktif dari Dinas Sosial dan lembaga terkait lainnya dalam mempelajari model ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengasuhan di LKSA dan mencegah penelantaran. Pengawasan yang ketat dan kolaborasi dengan *SOS Children's Villages* dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar di Indonesia mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak, sesuai dengan mandat hukum yang ada.

Berdasarkan arsip dokumen Profil SOS Desa Taruna Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (2024), *SOS Children's Villages* memiliki dua program utama yang fokus pada kesejahteraan anak, yaitu *alternatif care* dan penguatan keluarga. Program *alternatif care* dirancang untuk menyediakan pengasuhan bagi anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Di sisi lain, program penguatan keluarga bertujuan untuk memberdayakan keluarga yang mengalami kesulitan sosial dan psikologis, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah penelantaran.

Menanggapi permasalahan tingginya angka anak terlantar di Yogyakarta, khususnya di wilayah Gunungkidul, film dokumenter nonfiksi memiliki peran strategis sebagai media untuk menyampaikan informasi dan menggugah kesadaran masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Wells dalam buku (Fachrudin, 2012) dapat berfungsi sebagai sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program penguatan keluarga. Film dokumenter memanfaatkan rekaman aktual, wawancara, dan data relevan yang memperkuat narasi serta menjelaskan dampak dari isu sosial seperti penelantaran anak dan kondisi keluarga bermasalah. Dengan menyajikan isu ini dari sudut pandang tertentu, film dokumenter mampu menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya program penguatan keluarga dan mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Dinas Sosial, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi anak-anak.

Fokus utama film dokumenter ini adalah program penguatan keluarga yang dijalankan oleh *SOS Children's Village* sejak tahun 2006 hingga 2024, yang telah mendampingi lebih dari 1.000 keluarga di Indonesia. Program ini dirancang untuk mendukung anak-anak yang berisiko kehilangan pengasuhan melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. *SOS Children's Village* bekerja erat bersama keluarga dan masyarakat untuk memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi.

Gunungkidul dipilih sebagai lokasi untuk film dokumenter *Tanggung atau Runtuh* karena memiliki relevansi yang tinggi dengan tema yang diangkat, yaitu pengasuhan anak-anak dalam situasi rentan. Gunungkidul merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY, 2023), yang sering kali berdampak pada kesejahteraan anak, termasuk risiko kehilangan pengasuhan yang layak. Kondisi ini memberikan konteks sosial yang relevan untuk mendukung narasi dokumenter mengenai tantangan pengasuhan anak di tengah keterbatasan. Daerah ini memiliki keberadaan *SOS Children's Villages*, yang menjadi fokus utama dokumenter, sehingga memungkinkan penggambaran langsung tentang bagaimana program-program pengasuhan berbasis keluarga diterapkan. Selain itu, Gunungkidul memiliki latar geografis yang kuat dengan elemen visual yang menarik, seperti pedesaan, pegunungan, dan komunitas lokal yang khas. Menurut Aufderheide (2007), lokasi dalam dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai latar cerita tetapi juga sebagai karakter yang membantu memperkuat narasi.

Keunggulan program ini terletak pada tiga aspek utama: pelatihan keterampilan pengasuhan (*parental skill*) untuk memberdayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak, peningkatan ekonomi keluarga (*income generating*) agar keluarga dapat mandiri secara finansial, dan pengembangan sistem pendukung yang ramah anak di komunitas atau desa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Program ini memastikan bahwa keluarga memiliki dukungan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas mereka dalam jangka panjang, sekaligus mencegah anak-anak kehilangan pengasuhan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan ini, *SOS Children's Village*

berkontribusi pada pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberdayakan keluarga untuk menciptakan perubahan positif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, seperti yang diungkapkan Sobur (2013), "Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan di baliknya." Film dokumenter ini akan menjadi media yang mampu menyentuh hati masyarakat luas melalui narasi mendalam tentang kehidupan keluarga dampingan program penguatan keluarga.

Berbeda dengan film fiksi, film dokumenter berlandaskan pada fakta dan memiliki klaim kebenaran atas realitas yang diungkapkan (Aufderheide, 2007). Dalam konteks pembuatan film dokumenter Tanggub Atau Runtuh yang mengangkat tema kemanusiaan, pendekatan ini sangat relevan. Dengan memanfaatkan realitas yang sebenarnya, film dokumenter ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kritis yang dihadapi anak-anak yang kehilangan pengasuhan, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, dokumenter ini juga dapat berfungsi sebagai sarana advokasi sosial, mendorong pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak melalui program-program seperti penguatan keluarga dan pengasuhan alternatif yang penuh kasih.

Dalam produksi film dokumenter, peran produser sangat penting, dan peran tersebut erat kaitannya dengan fungsi manajerial untuk mencapai efektivitas dan pengoptimalan perencanaan produksi. Menurut Rahmitasari, manajemen produksi meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan proses produksi dengan tujuan menghasilkan sebuah karya yang didasarkan pada konsep dan ide produksi yang telah direncanakan sebelumnya (Muafa dan Junaedi, 2020). Manajemen produksi memang memainkan peran krusial dalam memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai rencana, sehingga hasil akhirnya dapat merefleksikan ide kreatif yang telah dirancang. Pengelolaan yang efektif memastikan efisiensi sumber daya dan pencapaian tujuan produksi secara optimal. Penerapan fungsi manajerial ini sangat krusial, terutama ketika menangani isu sensitif seperti kesejahteraan anak. Setiap keputusan produksi, mulai dari teknik pengambilan gambar hingga cara menyampaikan narasi, harus dipikirkan dengan

matang agar tidak mengeksploitasi situasi anak-anak yang rentan. Selain itu, produser harus mengelola anggaran dan waktu dengan bijak untuk memastikan bahwa dokumenter ini dapat memicu perubahan sosial melalui advokasi yang kuat.

Penerapan tentang optimalisasi fungsi manajerial dalam produksi film dokumenter yang mengangkat isu kesejahteraan anak akan memberikan wawasan penting mengenai bagaimana film dokumenter dapat menjadi alat advokasi yang efektif. Dengan penerapan prinsip manajemen yang baik, produser dapat meningkatkan kinerja tim produksi, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan bahwa film tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong tindakan nyata dari audiens untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan.

1.2 Manfaat penciptaan karya

1.2.1 Manfaat karya secara akademis

Menerapkan pengetahuan ilmu perkuliahan dalam produksi film memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan teori dan praktik, termasuk keterampilan sinematografi, pengeditan, dan manajemen produksi film dokumenter. Hal ini mendukung penciptaan audio visual yang berkualitas serta perencanaan yang efisien. Dalam konteks ini, film dokumenter tentang kesejahteraan anak, pengasuhan alternatif, dan hak-hak anak dapat menjadi subjek penelitian interdisipliner yang mencakup bidang sosiologi, psikologi, dan ekonomi.

Di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya film dan penyiaran, pembuatan film dokumenter ini menawarkan manfaat yang berarti. Selain meningkatkan keterampilan teknis dalam produksi, mahasiswa belajar cara menyampaikan isu-isu sosial secara efektif melalui media audio visual. Film dokumenter Tangguh Atau Runtuh juga dapat berfungsi sebagai bahan ajar yang berharga dalam diskusi akademis tentang hak-hak anak dan pengasuhan alternatif. Dengan mendokumentasikan kenyataan di lapangan, film ini menjadi sarana pembelajaran hidup bagi para pelajar di

bidang ilmu sosial, sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu kritis dalam masyarakat.

1.2.2 Manfaat karya secara praktis

Film dokumenter ini berfungsi sebagai alat advokasi yang ampuh untuk melindungi kesejahteraan anak. Dengan menampilkan kisah keluarga dampingan program penguatan keluarga dan anak-anak dalam sistem pengasuhan alternatif, film ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengasuhan yang layak dan hak-hak anak. Selain itu, film yang menyoroti pengabaian hak-hak anak menciptakan peluang bagi masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak anak.

Terdapat manfaat signifikan bagi penulis dalam produksi film dokumenter, terutama dalam memperoleh pengalaman praktis dalam manajemen produksi. Penulis belajar merencanakan dan mengorganisir semua tahap produksi, mulai dari penelitian hingga pengambilan gambar dan penyuntingan. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan dan pengetahuan tentang isu sosial, tetapi juga meningkatkan keterampilan manajerial dan komunikasi. Dengan keterlibatan ini, penulis tidak hanya berkontribusi pada proyek yang berdampak, tetapi juga berkembang menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan anak.